

TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PEMILU

Yoto Widodo¹ Betty Gama² Henny Sri Kusumastuti³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
yotowdd@yahoo.com

ABSTRAK

Abstrak. Salah satu indikator tingkat keberhasilan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan suatu negara adalah keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Mereka yang berpendidikan tinggi atau pendidikan rendah, baik sudah mengikuti beberapa kali pemilu atau yang baru pertama kali ikut pemilu (pemilih pemula). Setiap negara yang akan melaksanakan Pemilu, kelompok pemilih pemula selalu menjadi sorotan. Mereka merupakan pemilih potensial yang perlu mendapatkan sosialisasi dari pelaksana pemilu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, berusaha menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis data-data dari berbagai sumber. Tujuan penelitian adalah : satu, untuk mengidentifikasi bentuk dan isi pendidikan politik bagi generasi muda; dua, untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasil Penelitian menunjukkan bentuk pendidikan politik antara lain: pendidikan formal, di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi; non formal, pendidikan luar sekolah; dan informal, berupa pergaulan di rumah dan masyarakat. Isi pendidikan politik antara lain berupa pengenalan ideologi dan perjuangan partai-partai politik kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang paling rendah terdapat pada kelompok pemilih pemula. Jumlah non-voter (golongan putih) pemilih pemula dari pemilu satu ke pemilu yang lain terus meningkat. Jumlah non-voter pemilih pemula tertinggi terjadi pada pemilu tahun 2009.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemilih Pemula, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Partisipasi politik dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum selalu menjadi perbincangan hangat setiap suatu negara akan atau pasca pemilihan umum. Salah satu indikator tingkat keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih pemula. Tingkat partisipasi pemilih pemula di Indonesia dari satu pemilu ke pemilu berikutnya selalu mengalami fluktuasi, naik turun setiap pemilu. Jumlah nonvoter (biasa disebut golongan putih atau golput) yang didominasi oleh kaum muda, terus meningkat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Para pemilih pemula yang termasuk dalam kelompok Golput cenderung apatis dan masa bodoh terhadap proses pemilu, termasuk tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Salah satu cara utama untuk merubah dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula adalah melalui pendidikan politik. Adapun jalur pendidikan politik yang bisa digunakan sebagai sarana mensosialisasikan pengetahuan politik pemilih pemula antara lain melalui: pendidikan formal, di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi; non formal, pendidikan luar sekolah; dan informal, berupa pergaulan di rumah dan masyarakat. Melalui Pendidikan politik para generasi muda terutama bagi pemilih pemula akan mengerti dan memahami segala sesuatu yang terkait dengan masalah politik khususnya tentang partai-partai politik sebagai peserta pemilu.

Berlandaskan pada latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah : satu, untuk mengidentifikasi bentuk dan isi pendidikan politik bagi generasi muda; dua, untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu). Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis data-data dari berbagai sumber; buku, jurnal dan artikel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilih Pemula

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Jumlah pemilih pemula di Indonesia dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 persen). Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21 persen).

Jumlah pemilih pemula sangat signifikan, mengingat potensi yang dimilikinya, sebagaimana dilansir oleh Qodri dalam Rubyanti (2009) bahwa mereka : 1) akan membuat partai baru bisa lolos parlementary threshold, 2) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden; 3) berpeluang menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia. Karena posisi tersebut, mereka menjadi sasaran bidik partai politik. Pemilih pemula merupakan pemberi suara yang masih menggambang atau swing-voter, dimana sekitar 33,9% masih belum menentukan partai politik mana yang akan dipilih dan hanya 1,5% saja mengetahui keberadaan partai baru.

Fenyapwain (2013) membagi pemilih di Indonesia menjadi tiga kategori, yakni (1) pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam; (2) pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi; (3) pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Setiajid (2011) mengungkapkan bahwa pemilih pemula memiliki kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum, mengingat : (1) alasan kuantitatif yaitu mempunyai jumlah yang secara kuantitatif relatif banyak (2) merupakan segmen pemilih yang mempunyai pola yang sulit untuk diatur atau diprediksi, (3) kekhawatiran lebih condong golput dan (4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula. Kekuatiran krusial dari perilaku politik pemilih pemula adalah soal golput yang secara konseptual sering dikaitkan dengan persoalan partisipasi politik.

Pendidikan Politik

Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan apapun jenisnya, tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Begitu halnya pendidikan politik, yang memiliki misi untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang kehidupan politik. Pendidikan politik sangat penting untuk para generasi muda terutama bagi pemilih pemula. Mereka perlu mengerti dan memahami segala sesuatu yang terkait dengan masalah politik salah satunya tentang proses Pemilihan Umum (Pemilu).

Lebih lanjut tujuan pendidikan politik adalah sebagai suatu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan perjuangan partai politik tersebut kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Menurut Safrudin sebagaimana dikutip (Ahdiyana, 2009), menyatakan bahwa pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan terhadap konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Sedangkan menurut Panggabean (Sihabudin Zuhri, 2010) pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa menstransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian. Berdasarkan pemahaman ini, pendidikan politik tidak hanya sekedar menumbuhkan partisipasi politik (menggunakan hak pilih dalam pemilu- red) tetapi juga bagaimana dilakukan transfer pengetahuan tentang cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sihabuddin Zuhri, 2010).

Adapun jalur pendidikan politik antara lain melalui: pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan Taman Kanak-Kanak (PAUD dan TK), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (Universitas). Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti pada Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Sanggar, dll. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan di keluarga dan lingkungan masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan Informal menanamkan nilai-nilai; Pendidikan Agama, Budi Pekerti, Etika, Sopan Santun, Moral dan Sosialisasi.

Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui penanaman kesadaran politik dilakukan salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa :

“Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945”.

Pada jalur non formal, pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai kursus, pelatihan dan workshop yang bertema tentang bela negara dan pembinaan generasi muda tentang persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan pendidikan politik jalur informal, proses tersebut berjalan melalui komunikasi sosial secara timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan serta forum-forum kemasyarakatan lainnya.

Kekeliruan pandangan umum tentang politik generasi muda (pemilih pemula) dapat dipahami, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Bagi generasi muda (pemilih pemula) keaburan tentang pandangan politik menjadi besar karena realitas di tengah masyarakat dalam praktek kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Misalnya masih adanya fenomena politik uang (money politic) atau politik praktis yang memaksakan kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dalam kehidupan demokrasi, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Partisipasi dapat berbentuk dukungan yang datang dari berbagai pihak atau golongan. Partisipasi dapat datang dari rakyat yang sudah mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi khususnya Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Mawardi (2008), partisipasi politik rakyat merupakan keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit-hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai governance) dan juga politik secara luas, semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Munroe (2002) mendefinisikan partisipasi politik sebagai “the extent to which citizens use their rights, such as the right to protest, the right of free speech, the right to vote, to influence or to get involved in political activity.” Dengan demikian, partisipasi politik rakyat sebenarnya merupakan tema sentral dalam proses demokratisasi, di mana masyarakat dapat berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depan society-nya.

Sementara Mariam Budiharjo (2008) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,

antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (public policy). Berdasarkan definisi di atas, jelaslah agar masyarakat memiliki kadar partisipasi yang baik, maka perlu diberikan sebuah pemahaman tentang peran strategis mereka dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perannya dalam pemilihan umum.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini terkait dengan adanya tiga hak yang melekat pada dirinya, yaitu : hak sebagai warga negara, hak politik dan hak sosial.

Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua (Sastroatmodjo dalam Mardatillah, 2009), yaitu:

a. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

b. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Secara umum partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dari waktu ke waktu cukup tinggi, walaupun beberapa pihak berpendapat bukan merupakan partisipasi politik murni karena adanya tekanan dari pemerintah yang berkuasa. Misalnya, pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977 dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen (KPU.go.id akses 31 Oktober 2013).

Tingkat partisipasi politik mulai turun pada pemilu tahun 2009. Nurhadiatmono menyatakan bahwa angka partisipasi dalam pemilu 2009 adalah yang terendah dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, di mana untuk pemilihan legislatif pemilih yang menggunakan hak pilihnya 70,96%, sedangkan dalam pilpres 2009, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 72,56%, dan untuk penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang telah berlangsung di beberapa daerah menunjukkan potensi Golput yang berkisar 32% - 41,5% (KPU DIY, 2011). Sodikin, et.al. (2013) mencatat jumlah nonvoter (biasa disebut golongan putih atau golput) yang terutama didominasi oleh kaum muda, terus meningkat dari pemilu ke pemilu berikutnya; 10,21% pada Pemilu 1999, meningkat menjadi 23,34% pada Pemilu 2004, dan 39,10 % pada Pemilu 2009.

KESIMPULAN

Pendidikan politik untuk generasi muda (pemilih pemula) dapat dilaksanakan melalui 3 jalur: Jalur pendidikan formal, yaitu bentuk pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dari pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak (PAUD dan TK), pendidikan dasar (SD/ MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (Universitas). Pendidikan non formal, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti pada Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Sanggar, dll. Pendidikan Informal, jalur pendidikan di keluarga dan lingkungan masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa menstransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian. Isi pendidikan politik antara lain berupa pengenalan ideologi dan perjuangan partai-partai politik kepada masyarakat agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Melalui pendidikan politik diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi politik (menggunakan hak pilih dalam pemilu).

Partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya mengalami penurunan. Mereka Termasuk dalam kelompok nonvoter (biasa disebut golongan putih atau golput), golongan ini didominasi oleh generasi muda (pemilih pemula). Data menunjukkan; 10,21% pada Pemilu 1999, meningkat menjadi 23,34% pada Pemilu 2004, dan 39,10 % pada Pemilu 2009. Data tersebut memiliki makna pendidikan politik di Indonesia perlu ditingkatkan sehingga partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu berikutnya akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, Marita, 2009, Pemilu sebagai wahana Pendidikan Politik, Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXX STIA-AAN, 13 Juni 2009.
- Budiardjo, Miriam. 2008. DasarDasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fenyapwain, Marissa Marlein, 2013, Pengaruh Iklan Politik dalam pemilukada Minahasa terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di desa Tounalet Kecamatan Kakas, Journal "Acta Diurna", Volume I. No. 1, pp. 1-16.
- KPU Provinsi DIY, 2011, Pemilu 2009, Pemilukada 2010 dan 2011 di Provinsi DIY dalam angka, Yogyakarta.
- Mardatillah, 2010, Faktor-faktor yang mempengaruhi Munculnya Golput, (Studi Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009),Skripsi, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mawardi, Irvan, 2008, Pilkada dan Partisipasi Politik, artikel dalam jpr.org. akses tanggal 24 Mei 2011.
- Munroe, Trevor. (2002). *An Introduction to Politics: Lectures for First Year Students*. Jamaica: Stephenson's Litho Press.
- Nasiwan, 2005, Model Pendidikan Politik : Studi kasus PKS DPD Sleman, Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan, November, Th. XXIV, No. 3
- Perangin-angin, Loina Lalolo Krina dan Munawaroh Zainal, 2018, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial, Universitas Swiss German, Tangerang Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 4, Januari 2018 hlm. 737-754.
- Rubyanti, Rika, 2009, Pengaruh Popularitas terhadap Pilihan Pemilih pemula (Fenomena ma suknya artis dalam politik), Skripsi, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiajid, 2011, Orientasi Politik yang Mempengaruhi pemilih pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang tahun 2010, Integralistik, No.1/ Th.XXII/2011, Januari-Juni, pp.18-33.
- Sodikin, Amir and Wisnu Nugroho (2013). "Demokrasi Era Digital: Mengejar Generasi Pedas, Lekas, dan Bergegas", in Kompas Daily, edition Friday, October 25th, 2013, p. 54.
- Soeprapto, Adi, Dkk, 2014, Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 1, Januari-April 2014, halaman 39-54
- Sumarno, AP, 2002, Komunikasi Politik, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Zuhri, Sihabudin, 2010, Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik, akses e print Undip. Ac,Id/23898/ akses tanggal 29 Oktober 2013.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda?page=all>